

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

INSPEKTORAT

Jalan Pahlawan Nomor 19, Telpn: 0361-811311 Tabanan

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Perubahan Tahunan atau RENJA Perubahan merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kinerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kinerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada, diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk secara bersama-sama berperan aktif seta berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tabanan, 24 Agustus 2022
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN

Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661030 198610 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU	 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan	 8
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	 10
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	10
 BAB IV PENUTUP	 12

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No.9 Tahun 2015 telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Tabanan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, rencana kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan dimana Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih baik (*Good Governance*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan. Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Tabanan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tabanan dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4). Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68). Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tabanan. Hal tersebut dilakukan

dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah yang baik baik (*Good Governance*) dan bersih (*Good Governance*).

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat mengacu kepada:

- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang

- Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 14 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 - 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
 - 17 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);
 - 18 Peraturan Bupati Tabanan No. 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
 - 20 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);
- 21 Surat Edaran Bupati Tabanan No. 050/2426/Bapelitbang tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022 adalah :

- mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Mewujudkan aparatur yang profesional, handal dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan TW II Tahun 2022

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

- 3.1. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 Tujuan
 dan Program dan kegiatan Inspektorat T.A 2022
 dan Pendanaannya

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN BERKENAAN

2

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan sampai dengan TW II Tahun 2022

Tercapai dan tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money* yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ekonomis adalah perbandingan antara masuka (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya), Efisiensi adalah suatu pencapaian keluaran yang tertinggi dengan masukan tertentu, Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program berdasarkan target yang telah ditetapkan Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, Laporan Operasional (LO) dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan sampai dengan TW II Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1. berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S-d TW II Tahun 2022
Kabupaten Tabanan

[illegible]

1.1. 2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Dokumen		Kabupaten Tabanan	2,000,000.00						Pergeseran Anggaran
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	5 Dokumen		Kabupaten Tabanan	11,753,245,250.00			7,297,605,810.00	62.09		Pergeseran Anggaran
1.2. 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%		Kabupaten Tabanan	11,753,245,250.00			7,297,605,810.00	62.09		Pergeseran Anggaran
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	Persentase SDM yang bersertifikat	100%		Kabupaten Tabanan	328,590,000.00			960,000.00	0.29		Pergeseran Anggaran
1.3. 1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Persentase SDM yang bersertifikat	10 Orang		Kabupaten Tabanan	328,590,000.00			960,000.00	0.29		Pergeseran Anggaran
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	418,079,800.00			147,314,213.00	35.24		Pergeseran Anggaran
1.4. 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	4,555,000.00			1,516,900.00	33.30		Pergeseran Anggaran

1.4. 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tanggayang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	15,838,600.00			7,178,417.00	45.32	Pergeseran Anggaran
1.4. 3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	38,263,900.00			11,903,520.00	31.11	Pergeseran Anggaran
1.4. 4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	98,402,600.00			36,350,000.00	36.94	Pergeseran Anggaran
1.4. 5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	11,340,000.00					Pergeseran Anggaran
1.4. 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	169,889,700.00			47,368,920.00	28.18	Pergeseran Anggaran
1.4. 7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	79,790,000.00			42,491,600.00	53.26	Pergeseran Anggaran

1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%		Kabupaten Tabanan	81,417,400.00			70,818,000.00		86.98		Pergeseran Anggaran
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%		Kabupaten Tabanan	81,417,400.00			70,818,000.00		86.98		Pergeseran Anggaran
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		Kabupaten Tabanan	250,460,350.00			123,718,167.00		49.40		Pergeseran Anggaran
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	10,000,000.00			500,000.00		5.00		Pergeseran Anggaran
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	55,200,000.00			13,874,067.00		25.14		Pergeseran Anggaran
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%		Kabupaten Tabanan	185,260,350.00			103,342,100.00		59.02		Pergeseran Anggaran
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%		Kabupaten Tabanan	369,020,000.00			78,415,900.00		21.25		Pergeseran Anggaran

1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%		Kabupaten Tabanan	311,364,000.00			75,155,900.00		24.14		Pergeseran Anggaran
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%		Kabupaten Tabanan	57,656,000.00			8,321,000.00		5.65		Pergeseran Anggaran
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase capaian program kerja pemeriksaan tahunan	Persentase capaian program kerja pemeriksaan tahunan	100%		Kabupaten Tabanan	320,618,900.00			72,497,000.00		22.61		Pergeseran Anggaran
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti	100%		Kabupaten Tabanan	260,233,400.00			71,273,000.00		27.39		Pergeseran Anggaran
2.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	43 Dokumen		Kabupaten Tabanan	65,772,000.00			36,756,000.00		55.88		Pergeseran Anggaran
2.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	18 LHP		Kabupaten Tabanan	58,401,000.00			1,340,000.00		2.47		Pergeseran Anggaran
2.1.3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	2 LHP		Kabupaten Tabanan	27,499,500.00			1,549,000.00		12.91		Pergeseran Anggaran
2.1.4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	4 LHP		Kabupaten Tabanan	35,984,900.00			3,754,000.00		15.43		Pergeseran Anggaran

2.1.5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	10 LHP		Kabupaten Tabanan	36,288,000.00			36,288,000.00		3.63		Pergeseran Anggaran
2.1.6	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	24 LHP		Kabupaten Tabanan	36,288,000.00			36,288,000.00		62.44		Pergeseran Anggaran
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti	100%		Kabupaten Tabanan	60,385,500.00			1,224,000.00		2.03		Pergeseran Anggaran
2.2.1	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	2 LHP		Kabupaten Tabanan	27,499,500.00							Pergeseran Anggaran
2.2.2	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	6 LHP		Kabupaten Tabanan	32,886,000.00			1,224,000.00		3.72		Pergeseran Anggaran
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi yang telah dilaksanakan	100%		Kabupaten Tabanan	217,641,900.00			32,785,000.00		15.06		Pergeseran Anggaran
3.1	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%		Kabupaten Tabanan	217,641,900.00			32,785,000.00		15.06		Pergeseran Anggaran

3.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan/Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	40 OPD		Kabupaten Tabanan	54,984,000.00			13,363,000.00		24.31		Pergeseran Anggaran
3.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona Integritas	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	42 OPD		Kabupaten Tabanan	41,220,900.00							Pergeseran Anggaran
3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	8 Laporan		Kabupaten Tabanan	121,437,000.00			18,426,000.00		15.99		Pergeseran Anggaran
Jumlah							13,744,073,600.00		-	7,824,114,090.00		56.93		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022 disusun berbasis prioritas dan resiko. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan Rencana Awal dan Perubahan 2022 sebagai berikut:

6	1	1	2.0	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	100 persen	2,000,000.00	2,000,000.00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
6	1	1	2.0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											11,753,245,250.00	11,833,945,250.00	
6	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Pers en	11,753,245,250.00	11,833,945,250.00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
6	1	1	2.0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											328,590,000.00	306,990,000.00	
6	1	1	2.0	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase SDM yang bersertifikat	Persentase SDM yang bersertifikat	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Pers en	328,590,000.00	306,990,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
6	1	1	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											418,079,800.00	418,094,800.00	
6	1	1	2.0	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Pers en	4,555,000.00	4,555,000.00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		

6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Per sen	100 Pers en	100 Per sen	15,838,600.00	15,838,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Per sen	100 Pers en	100 Per sen	38,263,900.00	38,264,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Per sen	100 Pers en	100 Per sen	98,402,600.00	75,053,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Per sen	100 Pers en	100 Per sen	11,340,000.00	5,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

6	1	1	2.0	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Persen	100 Per sen	169,889,700.00	175,835,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
6	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Persen	100 Per sen	79,790,000.00	103,147,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
6	1	1	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												81,417,400.00	81,417,400.00	
6	1	1	2.0	6	Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 persen	100 per sen	81,417,400.00	81,417,400.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
6	1	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												250,460,350.00	252,564,200.00	
6	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Persen	100 Per sen	10,000,000.00	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		

6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Pers en	100 Per sen	55,200,000.00	55,200,000.00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Pers en	100 Per sen	187,354,200.00	185,260,350.00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Pers en	100 Per sen	330,864,000.00	311,364,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Per sen	100 Pers en	100 Per sen	57,656,000.00	57,656,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										320,618,900.00	597,692,900.00		
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										260,233,400.00	537,307,400.00		
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 LHP	4 LHP	100 Persen	100 Persen	65,772,000.00	89,145,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 LHP	12 LHP	100 Persen	100 Persen	58,401,000.00	139,650,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 LHP	3 LHP	100 Persen	100 Persen	27,499,500.00	45,493,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 LHP	4 LHP	100 Persen	100 Persen	35,984,900.00	98,275,800.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 LHP	12 LHP	100 Persen	100 Persen	36,288,000.00	97,963,600.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

6	1	2	2.0 1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 LHP	12 LHP	100 Persen	100 Persen	36,288,000.00	66,780,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											60,385,500.00	60,385,500.00	
6	1	2	2.0 2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 LHP	2 LHP	100 Persen	100 Persen	27,499,500.00	27,499,500.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6	1	2	2.0 2	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 LHP	6 LHP	100 Persen	100 Persen	32,886,000.00	32,886,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											217,641,900.00	474,161,900.00	
6	1	3	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi											217,641,900.00	474,161,900.00	
6	1	3	2.0 2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	Persentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yg telah dilaksanakan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	54,984,000.00	54,984,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

6	1	3	2.0 2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	Persentase Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	41,220,900.00	18,540,900.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6	1	3	2.0 2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	Persentase Koordinasi, Monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	121,437,000.00	400,637,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
TOTAL																13,744,073,600.00	14,358,376,450.00	

BAB IV

PENUTUP

4

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya di Inspektorat Kabupaten Tabanan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tabanan, 24 Agustus 2022
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661030 198610 1 003

BAB IV

PENUTUP

4

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya di Inspektorat Kabupaten Tabanan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tabanan, 24 Agustus 2022

INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN



Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJL, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661030 198610 1 003